RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

RISIKO STRATEGIS

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KUDUS

2023

KATA PENGANTAR

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko Operasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dan Penataan berisikan proses pengelolaan risiko operasional yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yangtelah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.

Kudus, Mei 2023
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS NAKERPERINKOP UKM

Dra. RINI KARTIKA HADI AHMAWATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690120 199403 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… i
DAFTAR ISI ……..…….. ii
DAFTAR TABEL …….. iii
DAFTAR LAMPIRAN …….. iv
BAB I. PENDAHULUAN ……...……..… 1
1.1. Latar belakang …….… 1
1.2. Dasar hukum …… 2
1.3. Maksud dan tujuan ……... 3
1.4. Ruang lingkup …….. 3
BAB II. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN 4
2.1. Kondisi lingkungan pengendalian saat ini ……..……. 4
2.2. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian……..…..… 6
BAB III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN…… 7
3.1. Penetapan Konteks/Tujuan……..…. 7
3.2. Hasil Identifikasi Risiko……..……..…. 12
3.3. Hasil Analisis Risiko…….…. 36
3.4. Pengendalian yang Ada dan yang Masih Dibutuhkan …… 48
BAB IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI……... 52
BAB V. RANCANGAN PEMANTAUAN……. 53
BAB VI. PENUTUP …….……. 54
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus……. 6

Tabel 2. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian…..... 7

Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko operasional 8

Tabel 4. Identifikasi Risiko Operasional..….....…. 11

Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Operasional …….....… 13

Tabel 6. Penentuan Risiko Operasional Prioritas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus..... 15

DAFTAR LAMPIRAN

Form 1A. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern/ CEE

Form 1B. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

Form 1C. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

Form 2C. Penetapan Konteks Risiko OperasionalOPD

Form 3C. Identifikasi Risiko Operasional OPD

Form 4. Hasil Analisis Risiko

Form 7. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Form 8. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

From 9. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

Form 10 Risk Event dan Pelaksanaan Risiko

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatukebijakan berkaitan dengan system pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIPtersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakanSPIP. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Kabupaten Kudus. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan,menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan

dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.

1.3. Maksud danTujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Ruang Lingkup

RTP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus merupakan pengendalian atas operasional/ kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKabupaten Kudus. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/ tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam dokumen ini dilakukan pengendalian atas sasaran kegiatan/operasional yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tingkat operasional berupa Renja/DPA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten KudusTahun 2023.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Sasaran kegiatan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya pelaporan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar
2. Meningkatkan layanan Pendukung Perkantoran
3. Meningkatkan Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus
6. Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar
7. Sosialisasi dan Fasilitas Penyusunan RTK Mikro
8. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
9. Fasilitasi Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Antar Kerja
10. Fasilitasi Pencari Kerja Yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja
11. Pelayanan Rekomendasi Paspor bagi CPMI
12. Fasilitasi/Koordinasi Informasi bagi Calon Transmigran
13. Peningkatan Pertumbuhan IKM di Kabupaten Kudus
14. Meningkatkan Kompetensi SDM Koperasi
15. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan,Permodalan dan SDM KUKM
16. Meningkatkan Layanan Pendukung Perkantoran
17. Meningkatkan Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18. Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
19. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
20. Fasilitasi Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Antar Kerja, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dan Pelayanan Rekomendasi Paspor Bagi CPMI
21. Fasilitasi/Koordinasi informasi bagi Calon Transmigran
22. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja di Kabupaten Kudus

Pengelolaan risiko operasional Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKabupaten Kudus bertujuan mengendalikan risiko-risiko dari pencapaian sasaran kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja/DPA. Pengelolaan risiko operasional dilakukan oleh Kepala bagian Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersama jajaran manajemennya.

BAB II

PERBAIKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

2.1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Identifikasi kelemahan lingkungan dilakukan berdasarkan persepsi internal melalui survey pegawai dan data dukung yang dimiliki oleh internal Dinas. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE Survei) ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian, berdasarkan hasil survei kepada 45% pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (sejumlah 20 orang) pada Form 1.a menunjukkan bahwa sub unsur dari kondisi lingkungan pengendalian memiliki simpulan memadai dan kurang memadai.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian juga dilakukan berdasarkan reviu dokumen internal dengan menggunakan data berupa Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil pemeriksaan dan dokumen lainnya. Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern sebagaimana disajikan pada Form 1.b. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada Tabel 1 sesuai Form 1.c sebagai berikut:

Tabel 1.

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen (INTERNAL)		Hasil Survei Persepsi (INTERNAL)		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	KURANG MEMADAI	belum ada diklat khusus manajemen resiko sehingga pegawai belum ada yang mengikuti pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	Kurang Memadai	belum ada pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	Kurang Memadai	perlu diadakan diklat khusus manajemen resiko dan pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala
2	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	KURANG MEMADAI	Belum dibentuk Tim Manajemen Resiko di Internal Dinas dan belum menetapkan kebijakan dan prosedur (SOP) pengawasan intern untuk mengarahkan/memandu kegiatan	Kurang Memadai	1.Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko 2.Pimpinan belum menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Kurang Memadai	Perlu dibentuk Tim Manajemen Resiko di Internal Dinas dan menetapkan kebijakan dan prosedur (SOP) pengawasan intern untuk mengarahkan/memandu kegiatan
3	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	KURANG MEMADAI	Belum ada Alokasi Penganggaran Pengembangan SDM Pegawai di Internal Dinas	KURANG MEMADAI	1. Tidak adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) 2. Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	1. SK tentang reward/punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) 2. Perlu mengusulkan diklat ke BKPSDM dan alokasi anggaran untuk diklat pengembangan SDM pegawai di internal OPD

Sumber: Kertas Kerja SPIP Dinas Nakerperinkopukm 2023

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur:

1. Komitmen terhadap Kompetensi dengan kelemahan yaitu belum ada diklat khusus manajemen resiko sehingga pegawai belum ada yang mengikuti pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala;
2. Kepemimpinan yang Kondusif dengan kelemahan yaitu belum ada kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko;
3. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM dengan kelemahan : Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan kompetensi SDM, dan belum ada reward

dan/atau punishment atas pengelolaan risiko.

2.2. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

Tabel 2.
Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	Komitmen terhadap Kompetensi	Kepala Nakerperinkopukm	Triwulan III Tahun 2024
	perlu diadakan diklat khusus manajemen resiko dan pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala		
2	Kepemimpinan yang Kondusif	Kepala Nakerperinkopukm	Triwulan I Tahun 2024
	Perlu dibentuk Tim Manajemen Resiko di Internal Dinas dan menetapkan kebijakan dan prosedur (SOP) pengawasan intern untuk mengarahkan/memandu kegiatan		
3	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kepala Nakerperinkopukm	Triwulan I-IV Tahun 2024
	1. SK tentang reward/punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) 2. Perlu mengusulkan diklat ke BKPSDM dan alokasi anggaran untuk diklat pengembangan SDM pegawai di internal OPD		

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.A : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Form 1.C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

3.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2023, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesempatan Kerja
2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja
4. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
5. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)
6. Meningkatnya Pengembangan Peran KUKM dalam Rangka Penguatan Industri
7. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko operasional perangkat daerah dilakukan atas sasaran pada tingkatan kegiatannya.

Dalam upaya pencapaian tujuan/sasaran kegiatan tersebut, penetapan konteks risiko operasional Dinas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko operasional

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Terukur***
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standa***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar***
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan***
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar***
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase Perusahaan yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja**
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	***Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro***
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Peserta Pelatihan Bersertifikasi Kompetensi**
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	***Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	***Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta***
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Pencari Kerja yang Sudah Bekerja**
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota***
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	***Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Online
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota***
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terlayani sesuai prosedur
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Kasus yang Terselesaikan**
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Dokumen Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
		Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Dibina
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase Koperasi Aktif**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah dokumen laporan tahunan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha**
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	***Jumlah dokumen laporan tahunan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
		Jumlah wirausaha yang menerima hibah bantuan modal usaha
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	***Jumlah dokumen laporan tahunan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Peningkatan Pertumbuhan IKM**
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	***Dokumen DED SIHT***
		Dokumen UKL-UPL
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
		Master plan
		Pemasangan lampu LPJU KIHT
		Pembangunan drainase terpasang SIHT Kudus
		Pembangunan gedung SIHT Kudus
		Pembangunan Jalan SIHT Kudus
		Pembangunan kantor pengelola SIHT Kudus
		Pembangunan pagar keliling amping kanan KIHT
		Pembangunan pagar pembatas untuk SIHT
		Pembangunan pos hanggar bea cukai SIHT Kudus
		Pembangunan pos keamanan KIHT
		Pembangunan ruang gas KIHT
		Pembinaan IHT
		Pendataan mesin pelinting rokok pada IHT di Kabupaten Kudus
		Penerangan untuk SIHT Kudus
		Pengadaan alat pemadam kebakaran untuk KIHT Kudus
		Pengadaan dan pemasangan CCTV KIHT
		Pengadaan dan pemasangan CCTV SIHT
		Pengadaan pintu gerbang
		Pengelolaan KIHT
		Studi kelayakan pembangunan SIHT
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
		pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan Peran Serta Masyarakat
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase Calon Transmigran yang Terfasilitasi**
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota***
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 2.C : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.*

3.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain koderisiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan

(*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagaiberikut:

Tabel 4. Identifikasi Risiko Operasional

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
1	**Kegiatan:** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1	***Sub Kegiatan :*** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Gagalnya penyusunan dokumen perencanaan 2. Tidak tepatnya jangka waktu penyusunan dokumen perencanaan 3. Tidak dapat mengidentifikasi hambatan dalam perencanaan 4. Penyusunan dokumen tidak dapat tercapai	1. Kurang tepatnya dalam menetapkan sasaran/tujuan perencanaan dokumen 2. Terlalu lambat dalam menyusun dokumen perencanaan 3. Kurangnya satu visi misi antar pembuat perencanaan serta kurangnya SDM perencana 4. persiapan perencanaan yang kurang matang	Perencanaan kegiatan tidak dapat berjalan dan tidak dapat tercapai sesuai yang di harapkan
1.2	***Sub Kegiatan :*** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Sumber data yang tidak terstruktur. 2. Terjadi kesalahan pengetikan dalam proses penginputan data dan kesalahan teknis dalam sistem. 3. Bahasa yang tidak jelas,ambigu dan tidak tepat. 4. Waktu yang terbatas dalam melaksanakan rapat 5. Informasi yang disampaikan tidak lengkap 6. Peserta rapat memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda tentang isu-isu yang dibahas 7. Kesulitan mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan	1. Tidak melakukan rekapitulasi data yang terstruktur 2. Jumlah data yang dimasukkan sangat banyak dan proses penginputan masih manual 3. Kekurangan komunikasi antara penulis laporan dan pengoreksi 4. Padatnya kegiatan masing-masing Bidang 5. Informasi tidak mencakup semua aspek 6. Tidak berkomunikasi dalam forum rapat secara terbuka dan mendengarkan perspektif 7. Kekurangan data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi yang komprehensif	1. Rekapitulasi data yang tidak memenuhi standart. 2. Data evaluasi kinerja yang diinput dan dihasilkan tidak valid 3. Menurunnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
2	**Kegiatan:** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.1	***Sub Kegiatan***: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Data jumlah ASN tidak valid 2. Perhitungan kertas kerja Gaji dan tunjangan tidak sesuai standar 3. Data daftar gaji kurang valid 4. Revisi dari bidang Perbendaharaan	1. Bendahara Gaji kurang teliti dalam melakukan update data pegawai 2. Bendahara Gaji tidak teliti dengan aturan penyesuaian tunjangan pegawai terbaru 3. Bendahara Gaji kurang teliti terhadap update data pegawai yang naik pangkat atau update tunjangan anak 4. Bendahara pengeluaran tidak teliti terkait jumlah gaji bruoto dan pajak yang dibayar.	1. Terjadi kekurangan gaji pegawai sehingga harus dilakukan perubahan anggaran 2. Bendahara pengeluaran membuat revisi pengajuan pembayaran gaji
2.2	**Sub Kegiatan:** Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. SK yang tersusun kurang valid 2. Data daftar penerimaan honor kurang valid	1. Pergantian pejabat dalam waktu singkat 2. Pembantu Bendahara pengeluaran tidak mengecek kesusuaian nomor rekening dan nama penerima	1. Sering terjadi Perubahan SK PPTK 2. Sering terjadi kesalahan transfer
2.3	**Sub Kegiatan:** Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Data dukung SPJ kurang lengkap 2. Data pemotongan pajak kurang valid 3. Revisi dari PPK	1. Komitmen bidang terkait pemenuhan kelengkapan dokumen SPJ kurang 2. Pembantu bendahara pengeluaran bidang tidak update tentang jenis pajak dan besaran potongannya 3. Bendahara pengeluaran salah input	1. Pembayaran belanja mengalami keterlambatan 2. Melakukan revisi dokumen pencairan
3	**Kegiatan :** Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3.1	***Sub Kegiatan:*** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Tidak terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik yang	1. Perencanaan dilaksanakan dengan melihat dari tahun sebelumnya bukan dari kebutuhan 2. Pemenuhan Komponen Instalasi	Jumlah Komponen Instalasi Listrik tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
		dibutuhkan	Listrik tidak sesuai dengan yang dibutuhkan	
3.2	**Sub Kegiatan** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Tidak terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Perlengkapan dan peralatan kantor kurang memadai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
3.3	**SubKegiatan** Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang tidak sesuai	Penyediaan Peralatan Rumah tangga yang tidak sesuai dengan kebutuhan	Terhambatnya proses kegiatan penunjang kinerja perangkat daerah
3.4	**SubKegiatan** Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perencanaan kegiatan / rapat / Informasi kunjungan Tamu	Perlunya penyediaan bahan logistik demi lancarnya penyelenggaraan koordinasi Pemerintahan	Keterbatasan penyediaan bahan logistik dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan
3.5	**SubKegiatan** Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk memenuhi data pendukung kegiatan	Perlunya cetak kertas untuk bukti setoran, cetak baner dan penggandaan Fotocopy untuk memperbanyak dokumen	Kurang terpenuhinya kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan
3.6	**SubKegiatan** Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Kebutuhan akan informasi sebagai penunjang pengambilan kebijakan 2. Penyediaan informasi tekstual terkini bagi seluruh ASN di semua Unit Kerja	Perlunya Informasi / Berita terkini dari semua Peristiwa yang terjadi	1. Sajian berita kurang mengena dan kurang up to date 2. Keterlambatan pembayaran tagihan
3.7	**SubKegiatan** Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya dasar surat tugas dari pimpinan untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi atau mengikuti rapat dalam dan luar daerah	Perlunya perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi kegiatan	Tidak tercapainya pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pemantauan dari kebijakan Pemerintah Daerah
4	**Kegiatan :** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4.1	**SubKegiatan** Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kurangnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Kebutuhan dokumen yang tidak sesuai kebutuhan	Terhambatnya pelaksanaan administrasi kantor
4.2	**SubKegiatan** Penyediaan	Penyalahgunaan alat komunikasi dan internet untuk kepentingan Pribadi	Perlunya fasilitas Internet untuk penunjang proses	Terhambatnya sarpras penunjang telpon

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		pekerjaan, Telpon untuk alat komunikasi dan serta ketersediaan air	untuk komunikasi dan fasilitas internet untuk kelancaran pekerjaan kantor
4.3	**SubKegiatan** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kurang maksimalnya capaian pemenuhan kebutuhan penunjang kegiatan operasional kantor	Pemenuhan kebutuhan penunjang kegiatan operasional kantor yang tidak sesuai kebutuhan	Kurangnya capaian jasa pelayanan umum kantor
5	**Kegiatan :** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.1	**SubKegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kurang terpenuhinya kebutuhan Operasional kantor	Kebutuhan Operasional yang menyesuaiakan indeks harga dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan regulasi dan kebijakan - kebijakan	Kurang optimalnya kinerja pegawai
5.2	**SubKegiatan** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Sarpras tidak bisa di service atau di perbaiki karena harus ada penggantian suku cadang yang mahal 2. Perawatan hanya sebatas pada saat di lakukan service, tanpa ada perawatan secara continue dari pihak pemakai	Perlunya sarpras penunjang kelancaran pekerjaan kantor yang harus di servis dan di rawat tiap tahunnya	Produk elektronik yang tidak semua barang baik,sehingga ada yang butuh perawatan lebih
6	**Kegiatan:** Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).			
6.1	**Sub Kegiatan** Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	1. Kurangnya pemahaman perusahaan terhadap manfaat RTK Mikro. 2. Koordinasi dengan perusahaan tidak bisa terjalin. 3. Perusahaan tidak menerima ketentuan terkait penyusunan	1. Kurangnya sosialisasi. 2. Kurangnya komunikasi. 3. Perusahaan kurang memahami manfaat RTK Mikro. 4. Kurangnya komitmen	1. Program Perencanaan Ketenagakerjan di Perusahaan Tidak Bisa berjalan. 2. Penempatan Tenaga Kerja

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
		RTK Mikro. 4. Komunikasi dengan perusahaan tidak terjalin. 5. Tidak tersusunnya dokumen RTK Mikro.	perusahaan untuk menyusun Dokumen RTK Mikro.	tidak bisa terpantau. 3. Penempatan Tenaga Kerja tidak sesuai dengan jabatan. 4. Kurangnya produktivitas perusahaan.
7	**Kegiatan** : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.			
7.1	**Sub Kegiatan** Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1. Koordinasi dengan LPKS/Ketua HILLSI Kab. Kudus tidak bisa berjalan 2. Tidak ada usulan Materi/Narasumber 3. LPKS bersikap pasif selama kegiatan Pembinaan LPKS 4. Tidak ada tindaklanjut dari LPKS	1. Kurangnya Sosialisasi 2. Masing-Masing LPKS memiliki permasalahan yang berbeda 3. Kesadaran LPKS untuk meningkatkan produktivitasnya masih kurang 4. Tidak memberikan dampak langsung kepada LPKS/ Memberatkan 5. / Rumit	1. Program Peningkatan Kualitas SDM/Pencari kerja tidak maksimal 2. Tidak semua permasalahan LPKS bisa diselesaikan 3. Kualitas LPKS tidak sesuai standart/keper cayaan publik menurun 4. Penyerapan alumni Pelatihan di Dunia Kerja Rendah
8	**Kegiatan :** Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota.			
8.1	**Sub Kegiatan** Pelayanan Antar Kerja	1. Kurangnya persiapan pencaker dalam memenuhi persyaratan pembuatan AK1. 2. Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan akun kemnaker dan emakaryo 3. AK1 tidak dapat dicetak.	1. Kurangnya sosialisasi. 2. Kurangnya ketelitian dalam input data di website kemnaker dan emakaryo. 3. Data pencaker tidak masuk di database kemnaker dan emakaryo.	1. Tidak mendapatkan notifikasi tentang peluang kerja 2. Penempatan Tenaga Kerja tidak bisa terpantau. 3. Pencari kerja kesulitan memperoleh pekerjaan/ maupun informasi lowongan pekerjaan.

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
9.	**Kegiatan:** Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
9.1	**Sub Kegiatan** Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1. Pencari kerja kurang memahami manfaat Kartu Pencari Kerja/AK1 2. Kriteria Pencari kerja tidak sesuai permintaan 3. Perusahaan/Pemberi kerja tidak menyampaikan informasi lowongan kerja 4. Penempatan tenaga kerja rendah	1. Kurangnya sosialisasi terkait informasi Aplikasi siap kerja/penempatan kerja 2. Dunia pendidikan belum link and mach dengan dunia kerja 3. Perusahaan mengadakan seleksi secara mandiri 4. Informasi lowongan kerja tidak diterima oleh pencari kerja	1. Pencari kerja tidak mendapatkan informasi lowongan kerja dengan benar 2. Banyak Peluang kerja yang tidak bisa terisi 3. Perusahaan tidak bisa mendapatkan pekerja sesuai kriteria yang dibutuhkan 4. Pendapatan masyarakat rendah/tingkat pengganguran tinggi
10	**Kegiatan :** Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota.			
10.1	**Sub Kegiatan** Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/ Kota	1. CPMI kesulitan mendaftar secara on line 2. Data yang di uploud tidak sesuai/tidak lengkap 3. Verifikasi membutuhkan waktu yang lama. 4. Rekomendasi belum bisa diterbitkan/ditolak	1. Kurangnya sosialisasi Aplikasi Siap kerja dan SDM CPMI yang terbatas 2. Kurangnya mengetahui persyaratan menjadi CPMI 3. Jaringan Aplikasi tidak stabil serta data yang salah/tidak lengkap 4. CPMI tertarik dengan jalur ilegal	1. Minat/Keinginan bekerja sebagai CPMI tidak maksimal 2. Program perluasan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri terhambat 3. Keberangkatan CPMI menjadi Tertunda. 4. Perlindungan PMI tidak terjamin
11	**Kegiatan** Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu)			

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
	Daerah Kabupaten/ Kota.			
11.1	**Sub Kegiatan** Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	1. Tidak ada masyarakat yang mendaftar sbg calon Transmigran 2. Calon Transmigran tidak memenuhi persyaratan 3. Tidak terjalin koordinasi / tidak mendapatkan informasi quota transmigran 4. Tidak mendapatkan quota/Kegiatan Transmigrasi tidak berjalan	1. Kurangnya sosialisasi Program Transmigrasi 2. Terbatasnya pengetahuan terkait manfaat transmigrasi 3. Terbatasnya Anggaran. 4. Daerah tujuan transmigrasi berkurang (Quota Prov. Jateng Sedikit)	1. Tidak ada pengiriman Transmigran 2. Program transmigrasi tidak tepat sasaran 3. Perluasan kesempatan kerja tidak tercapai. 4. Pemerataan persebaran penduduk tidak merata
12	**Kegiatan:** Pelaksanaan Pendidikan Berdasarkan Unit Kompetensi			
12.1	**Sub Kegiatan:** Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	1. Hasil Analisa Jenis Pelatihan Tidak Valid 2. Tidak Semua Jenis Pelatihan Tidak Terpublikasi 3. Syarat Peserta 4. Masyarakat Kesulitan Mendaftar 5. Masyarakat yang terpilih Mengikuti Kursus tidak sesuai dengan ketentuan	1. Waktu Pelaksanaan Analisa Terbatas 2. Kegiatan Analisa Hanya Formalitas 3. Belum Pernah dilakukan Survey Jenis Pelatihan yang Dibutuhkan 4. Petugas yang Menganalisa Kurang Kompeten 5. Publikasi yang dilakukan kurang tepat sasaran 6. Kurangnya Informasi Terkait Jenis Pelatihan yang diminati masyarakat oleh masyrakat luas 7. Instruktur Pelatihan dan Petugas Kurang Kompeten 5. Terdapat Peserta yang masih ada mitra dengan oknum petugas	1. Jenis Pelatihan Yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat 2. Kurang Peminat untuk mengikuti pelatihan 3. Kurangnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 4. Penggunaaan (Realisasi Anggaran) kurang tepat fungsi. 5. Kuota Tidak Tercukupi Karena Minat Masyarakat Kurang dengan Jenis Pelatihan 5. Tidak Semua Pendaftar yang lolos verifikasi

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
				dapat Mengikuti Pelatihan
13	**Kegiatan** Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
13.1	**Sub Kegiatan** Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Masih ada pengusaha yang belum mengajukan pengesahan Peraturan Perusahaan	Kurangnya pembinaan/sosialisasi tata cara pembuatan peraturan perusahaan	Pengusaha tidak memiliki peraturan perusahaan sebagai payung hukum yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja
		Terdapat pasal/ayat pada Peraturan Perusahaan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Petugas kurang kompeten/teliti	Ada pihak yang dirugikan terkait hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja
		Pengusaha/pekerja tidak mematuhi/melaksanakan Peraturan Perusahaan	Kurangnya pembinaan/sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	Dengan adanya pihak yang dirugikan bisa menimbulkan perselisihan hubungan industrial
13.2	**Sub Kegiatan** Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Masih ada pengusaha yang belum mengajukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kurangnya pembinaan/sosialisasi tata cara pembuatan perjanjian kerja bersama	Pengusaha tidak memiliki perjanjian kerja bersama sebagai payung hukum yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja
		Terdapat pasal/ayat pada Perjanjian Kerja Bersama yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Petugas kurang kompeten/teliti	Ada pihak yang dirugikan terkait hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja
		Pengusaha/pekerja tidak mematuhi/melaksanakan	Kurangnya pembinaan/sosialisasi	Dengan adanya pihak yang

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
		Perjanjian Kerja Bersama	peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	dirugikan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial
13.3	**Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Masih ada pengusaha yang belum melengkapi/memenuhi sarana hubungan industrial, dan jamsostek serta pengupahan	Kurangnya pembinaan/sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sehingga pengusaha dan pekerja belum mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya	Hak dan kewajiban pengusaha/pekerja belum dapat terpenuhi
		Data yang didapat belum/tidak akurat	Petugas kurang kompeten dan pengusaha yang kurang kooperatif	Hasil pendataan yang kurang optimal sehingga informasi yang didapat kurang akurat
13.4	**Kegiatan** Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
13.5	**Sub Kegiatan** Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belum semua perusahaan mendapatkan pembinaan/sosialisasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada perusahaan	Kurangnya pemanfaatan teknologi untuk pembinaan/sosialisasi pencegahan perselisihan hubungan industrial	Masih terjadi perselisihan hubungan industrial

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
		Masih terjadi perselisihan hubungan industrial diantara pekerja dan pengusaha dikarenakan belum dipenuhinya hak dan kewajiban pekerja/pengusaha	Pembinaan/sosialisasi belum mencakup semua perusahaan	Pengusaha dan pekerja belum memahami tata cara penyelesaian perselisihan hubugan industrial
13.6	**Sub Kegiatan** Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persyaratan penyelesaian perselisihan belum terpenuhi	Pengusaha/ pekerja belum memahami prosedur/tata cara penyelesaian perselisihan hubugan industrial	Perselisihan hubungan industrial tidak bisa cepat selesai
		Mediasi gagal	Salah satu/kedua belah pihak tetap pada pendapatnya masing-masing	Perselisihan hubungan industrial tidak bisa cepat selesai
13.7	**Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Adanya penolakan/ketidak siapan dari Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Dokumentasi/Pengarsipan Keanggotaan Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi tidak dikelola dengan baik	Tidak lengkap dan akuratnya data Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
		Data Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi tidak lengkap dan akurat	Kurangnya pembinaan/sosialisasi manfaat menjadi anggota organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh serta pengelolaan organisasi yang baik	Keterwakilan organisasi pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi pada Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit tidak akurat

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
13.8	**Sub Kegiatan** Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Salah satu unsur tidak dapat hadir	Kurangya monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan operasional LKS Tripartit	Permasalahan dan isu-isu di bidang ketenagakerjaan yang sedang berkembang tidak/belum bisa dipecahkan/dibahas bersama oleh LKS Tripartit
		Terjadi perbedaan pendapat dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah	Setiap unsur mempunyai kepentingan masing-masing	LKS Tripartit tidak dapat memberi masukan dan saran di bidang ketenagakerjaan kepada Kepala Daerah sesuai tugasnya
13.9	**Sub Kegiatan** Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Belum dipenuhinya atau kurang lengkapnya pelaksanaan jamsostek dan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan	Kurangnya pembinaan/sosialisasi Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pekerja tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dan tidak mendapatkan fasilitas kesejahteraan pekerja
		Masih terdapat perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jamsostek dan belum menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja	Kurangnya kesadaran pengusaha dalam mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan terbatasnya lahan tempat usaha untuk menyediakan failitas kesejahteraan pekerja	Pekerja tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dan tidak mendapatkan fasilitas kesejahteraan pekerja
14	**Kegiatan** Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperas yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
14.1	**Sub Kegiatan** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1. Hasil Analisa Jenis Pelatihan Tidak Valid 2. Jumlah Narasumber Pelatihan yang mengetahui perkoperasian terbatas 3. Keterbatasan SDM pengelola koperasi yang mengikuti	1. Belum terpetakannya kebutuhan jenis pelatihan perkoperasian 2. Jumlah Narasumber Pelatihan yang mengetahui perkoperasian	1. Tidak adanya database jenis pelatihan yang diminati oleh koperasi 2. Pengelola

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
		pelatihan 4. SDM Koperasi yang terpilih mengikuti pelatihan tidak sesuai dengan ketentuan	terbatas 3. Kurangnya publikasi kepada koperasi 4. Kurangnya minat pengelola koperasi untuk mengikuti pelatihan karena lebih mementingkan usahanya	koperasi yang mengikuti pelatihan terbatas 3. Kurangnya SDM pengelola koperasi yang memahami perkoperasian 4. Kuota pelatihan yang tidak tercukupi karena minat pengelola koperasi kurang
15	**Kegiatan :** Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
15.1	**Sub Kegiatan** Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1. Hasil Analisa Jenis Sosialisasi Tidak Valid. 2. Keterbatasan SDM 3. SDM UMKM yang terpilih mengikuti sosialisasi tidak sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan 4. Verifikasi membutuhkan waktu karena harus memverifikasi lokasi usaha, domisili peserta dan sekretatiat kelompok.	1. Belum terpetakannya kebutuhan jenis sosialisasi dan penerima hibah tepat sasaran 2. Kurangnya publikasi kepada pelaku UMKM 3. Minat pelaku UMKM untuk mengikuti sosialisasi dan Hibah uang sangat banyak	1. Tidak adanya database jenis pelatihan yang diminati oleh UMKM. 2. Kurangnya SDM UMKM yang memahami masalah permodalan, pemasaran dan lembaga keuangan. 3. Kuota sosialisasi

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
				dan hibah kurang karena jumlah UMKM sangat banyak.
16	**Kegiatan:** Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
16.1	**Sub Kegiatan:** Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM, serta Desain dan Teknologi	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan Anggaran kurang cermat	1. Waktu Pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Kegiatan Identifikasi kurang optimal 3. Peserta Pameran Terbatas 4.Perencanaan Anggaran Kurang Cermat	1. Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi kurang optimal
17	**Kegiatan**: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
17.1	**Sub Kegiatan:** Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan hanya formalitas 3. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 4. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 5. Lamanya proses lelang (pemilihan	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Dokumen Perencanaan Pembangunan Ruang Penyimpanan

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
			penyedia) 6. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 7. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan 8. Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	Tabung Gas Laboratorium KIHT Kudus yang tersusun kurang akurat dan kurang tepat guna
		1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan hanya formalitas 3. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 4. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 5. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 6. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 7. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan 8. Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Dokumen Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Ruang Penyimpanan Tabung Gas Laboratorium KIHT Kudus yang tersusun kurang akurat dan kurang tepat guna
		1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan hanya formalitas 3. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
		pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	dilaksanakan 4. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 5. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 6. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 7. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan 8. Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	menyebabkan kerugian negara 5. Ruang Penyimpanan Tabung Gas Laboratorium KIHT Kudus yang terbangun kurang memenuhi standar dan manfaatnya tidak optimal
		1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan hanya formalitas 3. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 4. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 5. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 6. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 7. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan 8. Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pos Keamanan KIHT Kudus yang tersusun kurang akurat dan kurang tepat guna

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
		1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan hanya formalitas 3. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 4. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 5. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 6. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 7. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan 8. Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Dokumen Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pos Keamanan KIHT Kudus yang tersusun kurang akurat dan kurang tepat guna
		1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan hanya formalitas 3. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 4. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 5. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 6. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 7. Kesulitan dalam	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Pos Keamanan KIHT Kudus yang terbangun kurang memenuhi standar dan manfaatnya tidak optimal

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
			mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan 8. Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	
		1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan hanya formalitas 3. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 4. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 5. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 6. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 7. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan 8. Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Dokumen Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling KIHT Kudus (samping kanan) yang tersusun kurang akurat dan kurang tepat guna
		1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan hanya formalitas 3. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 4. Petugas yang melaksanakan	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Dokumen Hasil Pelaksanaan

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
			Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 5. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 6. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 7. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan 8. Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling KIHT Kudus (samping kanan) yang tersusun kurang akurat dan kurang tepat guna
		1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan hanya formalitas 3. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 4. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 5. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 6. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 7. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan 8. Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Pagar Keliling KIHT Kudus (samping kanan) yang terbangun kurang memenuhi standar dan manfaatnya tidak optimal

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
		1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan 6. Kurang lancarnya operasional Laboratorium KIHT Kudus 7. Prosedur Pelayanan Laboratorium tidak sesuai SOP 8. Tidak terlayaninya pengujian tar dan nikotin di Laboratorium KIHT Kudus	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 3. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 4. SOP tidak tersusun oleh personil yang kompeten 5. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 6. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 7. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan 8. Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan 9. Tidak tersedianya alat dan bahan	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Terhambat nya operasional Laboratoriu m KIHT Kudus 6. Pelayanan Laboratorium tidak sesuai ekspektasi masyarakat
		1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan 6. Kurang lancarnya operasional KIHT	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 3. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 4. SOP tidak tersusun oleh	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Terhambat nya operasional KIHT Kudus

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
		Kudus 7. Prosedur Pelayanan di KIHT Kudus tidak sesuai SOP	personil yang kompeten 5. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 6. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 7. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan 8. Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan 9. Tidak tersedianya sarpras yang	6. KIHT Kudus tidak terpelihara dengan baik 7. Pelayanan di KIHT Kudus tidak sesuai ekspektasi masyarakat
18	**Kegiatan:** Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
18.1	**Sub Kegiatan:** Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Kurangnya kerjasama yang baik dengan Instansi/Lembaga terkait 4. Keterlambatan dalam proses pengadaan 5. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 6. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 3. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 4. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 5. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 6. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Lahan SIHT Kudus tidak dapat tersiapkan

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
			7. Kurang optimalnya pengawasan	
		1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 3. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 4. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 5. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 6. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan 7. Kurang optimalnya pengawasan 8. pelaksanaan pekerjaan	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. SIHT Kudus yang terbangung kurang sesuai dengan ekspektasi masyarakat 6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya Pembangunan SIHT Kudus tidak terwujud
19	**Kegiatan:** Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
19.1	**Sub Kegiatan:** Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Penjadwalan kegiatan dan Pembagian Tim kurang sesuai/tepat 3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang direncanakan 4. Keterlambatan pengumpulan hasil 5. Keterlambatan penyusunan Laporan Hasil	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Keterbatasan personil/SDM pelaksana 3. Banyaknya beban kerja tidak sebanding dengan jumlah personil Bidang 4. 5. Kurangnya komitmen pimpinan	1. Pembinaan dan Pengawasan IHT tidak dapat terlaksana dengan baik 2. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 3. Tidak diperoleh Data IHT yang akurat

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
				menghambat dalam perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IHT di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
19.2	**Sub Kegiatan:** Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Tidak dilakukan Survey terkait Pengadaan Bar/Jas yang akan dilaksanakan 3. Petugas yang melaksanakan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang kompeten 4. Lamanya proses lelang (pemilihan penyedia) 5. Kurangnya kompetensi Penyedia Bar/Jas 6. Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan pekerjaan	1. Hasil Pekerjaan Pengadaan Bar/Jas tidak sesuai kebutuhan 2. Salah memilih Penyedia 3. Gagal lelang 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Laporan Data Mesin Pelinting tidak dapat tersampaikan kepada K/L terkait
20	**Kegiatan:** Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
20.1	Sub Kegiatan: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Penjadwalan kegiatan dan Pembagian Tim kurang sesuai/tepat 3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang direncanakan 4. Keterlambatan pengumpulan hasil 5. Keterlambatan	1. Waktu pelaksanaan identifikasi terbatas 2. Keterbatasan personil/SDM pelaksana 3. Banyaknya beban kerja tidak sebanding dengan jumlah personil	1. Kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik 2. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 3. Tidak diperoleh

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
		penyusunan Laporan Hasil	Bidang 4. Kurangnya komitmen pimpinan	Data IKM yang akurat menghambat dalam perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I: *Form 3.C : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus*

a. Analisis Risiko

i. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus. Dari hasil identifikasi risiko diperoleh informasi sebagai berikut: Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Operasional Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.

Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Operasional

No.	Risiko	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	1. Gagalnya penyusunan dokumen perencanaan 2. Tidak tepatnya jangka waktu penyusunan dokumen perencanaan 3. Tidak dapat mengidentifikasi hambatan dalam perencanaan 4. Penyusunan dokumen tidak dapat tercapai	3	2	6
2	1. Sumber data yang tidak terstruktur. 2. Terjadi kesalahan pengetikan dalam proses penginputan data dan kesalahan teknis dalam sistem. 3. Bahasa yang tidak jelas,ambigu dan tidak tepat. 4. Waktu yang terbatas dalam melaksanakan rapat 5. Informasi yang disampaikan tidak lengkap 6. Peserta rapat memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda tentang isu-isu yang dibahas 7. Kesulitan mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan	3	2	6

No.	Risiko	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
3	1. Data jumlah ASN tidak valid 2. Perhitungan kertas kerja Gajidan tunjangan tidak sesuai standar 3. Data daftar gaji kurang valid 4. Revisi dari bidang Perbendaharaan	2	2	4
4	1. SK yang tersusun kurang valid 2. Data daftar penerimaan honor kurang valid	2	1	2
5	1. Data dukung SPJ kurang lengkap 2. Data pemotongan pajak kurang valid 3. Revisi dari PPK	3	2	6
6	1. Perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Tidak terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan	3	2	6
7	1. Perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Tidak terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	2	3	6
8	Perencanaan kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang tidak sesuai	3	1	3
9	Perencanaan kegiatan / rapat / Informasi kunjungan Tamu	3	1	3
10	Kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk memenuhi data pendukung kegiatan	2	1	2
11	1. Kebutuhan akan informasi sebagai penunjang pengambilan kebijakan 2. Penyediaan informasi tekstual terkini bagi seluruh ASN di semua Unit Kerja	3	1	3
12	Adanya dasar surat tugas dari pimpinan untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi atau mengikuti rapat dalam dan luar daerah	3	2	6
13	Kurangnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	4
14	Penyalahgunaan alat komunikasi dan internet untuk kepentingan Pribadi	2	2	4
15	Kurang maksimalnya capaian pemenuhan kebutuhan penunjang kegiatan operasional kantor	2	3	6
16	Kurang terpenuhinya kebutuhan Operasional kantor	3	2	6
17	1. Sarpras tidak bisa di service atau di perbaiki karena harus ada penggantian suku cadang yang mahal	3	2	6

No.	Risiko	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
	2. Perawatan hanya sebatas pada saat di lakukan service, tanpa ada perawatan secara continue dari pihak pemakai			
18	1. Kurangnya pemahaman perusahaan terhadap manfaat RTK Mikro. 2. Koordinasi dengan perusahaan tidak bisa terjalin. 3. Perusahaan tidak menerima ketentuan terkait penyusunan RTK Mikro. 4. Komunikasi dengan perusahaan tidak terjalin. 5. Tidak tersusunnya dokumen RTK Mikro.	2	1	2
19	1. Koordinasi dengan LPKS/Ketua HILLSI Kab. Kudus tidak bisa berjalan 2. Tidak ada usulan Materi/Narasumber 3. LPKS bersikap pasif selama kegiatan Pembinaan LPKS 4. Tidak ada tindaklanjut dari LPKS	2	1	2
20	1. Kurangnya persiapan pencaker dalam memenuhi persyaratan pembuatan AK1. 2. Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan akun kemnaker dan emakaryo. 3. AK1 tidak dapat dicetak.	2	1	2
21	1. Pencari kerja kurang memahami manfaat Kartu Pencari Kerja/AK1 2. Kriteria Pencari kerja tidak sesuai permintaan 3. Perusahaan/Pemberi kerja tidak menyampaikan informasi lowongan kerja 4. Penempatan tenaga kerja rendah	3	4	12
22	1. CPMI kesulitan mendaftar secara online 2. Data yang diupload tidak sesuai/tidak lengkap 3. Verifikasi membutuhkan waktu yang lama 4. Rekomendasi belum bisa diterbitkan/ditolak	3	4	12
23	1. Tidak ada masyarakat yang mendaftar sbg calon Transmigran 2. Calon Transmigran tidak memenuhi persyaratan 3. Tidak terjalin koordinasi / tidak mendapatkan informasi quota transmigran	2	3	6

No.	Risiko	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
	4. Tidak mendapatkan quota/Kegiatan Transmigrasi tidak berjalan			
24	1. Hasil Analisa Jenis Pelatihan Tidak Valid 2. Tidak Semua Jenis Pelatihan Tidak Terpublikasi 3. Syarat Peserta 4. Masyarakat Kesulitan Mendaftar 5. Masyarakat yang terpilih Mengikuti Kursus tidak sesuai dengan ketentuan	2	2	4
25	Masih ada pengusaha yang belum mengajukan pengesahan Peraturan Perusahaan	2	2	4
26	Terdapat pasal/ayat pada Peraturan Perusahaan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1	2	2
27	Pengusaha/pekerja tidak mematuhi/melaksanakan Peraturan Perusahaan	2	2	4
28	Masih ada pengusaha yang belum mengajukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	1	2	2
29	Terdapat pasal/ayat pada Perjanjian Kerja Bersama yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2	2	4
30	Pengusaha/pekerja tidak mematuhi/melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama	2	1	2
31	Masih ada pengusaha yang belum melengkapi/memenuhi sarana hubungan industrial, dan jamsostek serta pengupahan	1	2	2
32	Data yang didapat belum/tidak akurat	2	1	2
33	Belum semua perusahaan mendapatkan pembinaan/sosialisasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada perusahaan	1	2	2
34	Masih terjadi perselisihan hubungan industrial diantara pekerja dan pengusaha dikarenakan belum dipenuhinya hak dan kewajiban pekerja/pengusaha	1	2	2
35	Persyaratan penyelesaian perselisihan belum terpenuhi	1	2	2
36	Mediasi gagal	3	2	6

No.	Risiko	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
37	Adanya penolakan/ketidak siapan dari Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	1	2	2
38	Data Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi tidak lengkap dan akurat	1	2	2
39	Salah satu unsur tidak dapat hadir	2	2	4
40	Terjadi perbedaan pendapat dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah	1	2	2
41	Belum dipenuhinya atau kurang lengkapnya pelaksanaan jamsostek dan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan	3	2	6
41	Masih terdapat perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jamsostek dan belum menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja	2	2	4
42	1. Hasil analisa jenis pelatihan tidak valid 2. Jumlah Narasumber Pelatihan yang mengetahui perkoperasian terbatas 3. Keterbatasan SDM pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan 4. SDM Koperasi yang terpilih mengikuti pelatihan tidak sesuai dengan ketentuan	3	2	6
43	1. Hasil Analisa Jenis Sosialisasi Tidak Valid. 2. Keterbatasan SDM 3. SDM UMKM yang terpilih mengikuti sosialisasi tidak sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan	3	2	6
44	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan Hibah Wira Usaha kurang cermat 3. Keterlambatan dalam proses pencairan	2	2	4
45	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan Anggaran kurang cermat	2	2	4
46	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan	2	1	2

No.	Risiko	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
	5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan			
47	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	3	3	9
48	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	3	3	9
49	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	3	3	9
50	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	3	3	9
51	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	3	3	9
52	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan	3	3	9

No.	Risiko	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
	Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan			
53	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	3	3	9
54	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	3	3	9
55	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	3	3	9
56	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan 6. Kurang lancarnya operasional Laboratorium KIHT Kudus 7. Prosedur Pelayanan Laboratorium tidak sesuai SOP 8. Tidak terlayaninya pengujian tar dan nikotin di Laboratorium KIHT	3	2	6

No.	Risiko	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
57	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. 4. Keterlambatan dalam proses pengadaan 5. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 6. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan 7. Kurang lancarnya operasional KIHT Kudus 8. Prosedur Pelayanan di KIHT Kudus tidak sesuai SOP	3	3	9
58	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Kurangnya kerjasama yang baik dengan Instansi/Lembaga terkait 4. 5. Keterlambatan dalam proses pengadaan 6. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 7. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	3	3	9
59	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. 4. Keterlambatan dalam proses pengadaan 5. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 6. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	3	3	9
60	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Penjadwalan kegiatan dan Pembagian Tim kurang sesuai/tepat 3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang direncanakan 4. Keterlambatan pengumpulan hasil 5. Keterlambatan penyusunan Laporan Hasil	2	3	6
61	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan	2	3	6

No.	Risiko	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
	fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan			
62	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Penjadwalan kegiatan dan Pembagian Tim kurang sesuai/tepat 3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang direncanakan 4. Keterlambatan pengumpulan hasil 5. Keterlambatan penyusunan Laporan Hasil	2	3	6

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 4. : Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Operasional.

ii. Memvalidasi Risiko

Berdasarkan hasil analisis risiko, terdapat beberapa risiko yang dijadikan risiko prioritas dan harus disusun rencana tindak pengendaliannya. Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang” dengan nilai skala dampak lebih dari 6.

Tabel 6. Penentuan Risiko Operasional Prioritas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus

No	Risiko Prioritas	Nilai Risiko
1	1. Gagalnya penyusunan dokumen perencanaan 2. Tidak tepatnya jangka waktu penyusunan dokumen perencanaan 3. Tidak dapat mengidentifikasi hambatan dalam perencanaan Penyusunan dokumen tidak dapat tercapai	6
2	1. Sumber data yang tidak terstruktur. 2. Terjadi kesalahan pengetikan dalam proses penginputan data dan kesalahan teknis dalam sistem. 3. Bahasa yang tidak jelas,ambigu dan tidak tepat. 4. Waktu yang terbatas dalam melaksanakan rapat 5. Informasi yang disampaikan tidak lengkap 6. Peserta rapat memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda tentang isu-isu yang dibahas 7. Kesulitan mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan	6
3	1. Data dukung SPJ kurang lengkap Data pemotongan pajak kurang valid Revisi dari PPK	
4	1. Perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Tidak terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan	6
5	1. Perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Tidak terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	6
6	Adanya dasar surat tugas dari pimpinan untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi atau mengikuti rapat dalam dan luar daerah	6
7	Kurang maksimalnya capaian pemenuhan kebutuhan penunjang kegiatan operasional kantor	6
8	Kurang terpenuhinya kebutuhan Operasional kantor	6
9	1. Sarpras tidak bisa di service atau di perbaiki karena harus ada penggantian suku cadang yang mahal 2. Perawatan hanya sebatas pada saat di lakukan service, tanpa ada perawatan secara continue dari pihak pemakai	6
10	1. Kurangnya persiapan pencaker dalam memenuhi persyaratan pembuatan AK1.	6

No	Risiko Prioritas	Nilai Risiko
	2. Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan akun kemnaker dan emakaryo. 3. AK1 tidak dapat dicetak.	
11	1. Pencari kerja kurang memahami manfaat Kartu Pencari Kerja/AK1 2. Kriteria Pencari kerja tidak sesuai permintaan 3. Perusahaan/Pemberi kerja tidak menyampaikan informasi lowongan kerja 4. Penempatan tenaga kerja rendah	12
12	1. CPMI kesulitan mendaftar secara on line 2. Data yang di uploud tidak sesuai/tidak lengkap 3. Verifikasi membutuhkan waktu yang lama. 4. Rekomendasi belum bisa diterbitkan/ditolak	12
13	1. Tidak ada masyarakat yang mendaftar sbg calon Transmigran 2. Calon Transmigran tidak memenuhi persyaratan 3. Tidak terjalin koordinasi / tidak mendapatkan informasi quota transmigran 4. Tidak mendapatkan quota/Kegiatan Transmigrasi tidak berjalan	6
14	Mediasi Antara tenaga Kerja dan Perusahaan gagal	6
15	1. Hasil Analisa Jenis Pelatihan Tidak Valid 2. Jumlah Narasumber Pelatihan yang mengetahui perkoperasian terbatas 3. Keterbatasan SDM pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan 4. SDM Koperasi yang terpilih mengikuti pelatihan tidak sesuai dengan ketentuan	6
16	1. Hasil Analisa Jenis Sosialisasi Tidak Valid. 2. Keterbatasan SDM 3. SDM UMKM yang terpilih mengikuti sosialisasi tidak sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan 4. Verifikasi membutuhkan waktu karena harus memverifikasi lokasi usaha, domisili peserta dan sekretariat kelompok	6
17	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	9
18	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	9
19	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	9
20	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	9
21	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan	9

No	Risiko Prioritas	Nilai Risiko
	4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	
22	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	9
23	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	9
24	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan 6. Kurang lancarnya operasional Laboratorium KIHT Kudus 7.Prosedur Pelayanan Laboratorium tidak sesuai SOP 8.Tidak terlayaninya penggujian tar dan nikoti di Laboratorium KIHT Kudus	6
25	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan 6. Kurang lancarnya operasional KIHT Kudus 7. Prosedur Pelayanan di KIHT Kudus tidak sesuai SOP	6
26	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Kurangnya kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga terkait 4. Keterlambatan dalam proses pengadaan 5. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 6. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	9
27	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	9
28	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	4
29	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Bar/Jas kurang tepat 3. Keterlambatan dalam proses pengadaan 4. Keterlambatan dalam pengerjaan fisik pekerjaan 5. Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	6
30	1. Hasil identifikasi kebutuhan kurang tepat 2. Penjadwalan kegiatan dan Pembagian Tim kurang sesuai/tepat	6

No	Risiko Prioritas	Nilai Risiko
	3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang direncanakan 4. Keterlambatan pengumpulan hasil 5. Keterlambatan penyusunan Laporan Hasil	

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.*

b. Pengendalian yang Ada dan yang Masih Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

iii. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6*

2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
b. Mengubah/ Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko(*Abate)*
c. Mengubah/ Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko(*Mitigate*)
d. Membagi Risiko (*Share)* atau Mentransfer Risiko
e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Berdasarkan risiko prioritas tersebut Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus membuat rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional OPD sebagaiberikut :

1. Membuat perencanaan baru yang dipersiapkandengan matang agar tidak mengalami kegagalan lagidalam penyusunan dokumen
2. Mengumpulkan data secara komprehensif
3. Peningkatan Kompetensi penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui diklat/bimtek"
4. Koordinasi dengan Bidang Perbendaharaan dan KPP Kudus
5. Peningkatan Kompetensi pengelola keuangan melalui diklat/bimtek"
6. Koordinasi dan konsultasi terkait kebutuhan instalasi listrik
7. Konsultasi dan Koordinasi dengan bappeda untuk tindak lanjut priortias kebutuhan
8. Pengusulan Pergeseran anggaran Perangkat Daerah
9. Konsultasi dan Koordinasi dengan bappeda untuk tindak lanjut priortias kebutuhan
10. Memberikan sosialisasi tahapan pembuatan AK1 melalui media sosial.
11. Koordinasi dengan Dunia usaha/Penyedia kerja

12. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja sesuai Permenaker No. 39 Tahun 2016"
13. Memberikan Soisalisasi Persyaratan sebagai CPMI Sesuai PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
14. Koordinasi dengan Tingkat Provinsi terkait quota transmigran
15. Menyampaikan informasi program transmigrasi kepada calon transmigran
16. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja sesuai Permenaker No. 39 Tahun 2016"
17. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan sarana hubungan industrial
18. Memberikan sosialisasi dan publikasi jenis pelatihan perkoperasian
19. Update Jenis Pelatihan yang dibutuhkan koperasi
20. Update review SOP/ aturan
21. Memberikan sosialisasi dan publikasi jenis sosialisasi dan hibah uang
22. Update Jenis sosialisasi dan hibah uang yang dibutuhkan UMKM
23. Koordinasi secara Intensif dengan BPPKAD
24. Koordinasi Internal pada Dinas
25. Koordinasi secara Intensif dengan Kelompok Wira Usaha
26. Koordinasi secara Intensif dengan BPPKAD
27. Koordinasi Intensif dengan Bagian Layanan Pengadaan Bar/Jas selama proses lelang
28. Penyesuaian jadwal pekerjaan fisik dengan aktivitas kantor
29. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara intensif
30. Pengawasan terhadap jaminan pemeliharaan hasil pekerjaan
31. Penyesuaian jadwal pekerjaan fisik dengan aktivitas kantor
32. Peningkatan kompetensi SDM Laboratorium KIHT
33. Pelaksanaan Audit Internal dan Kajian Manajemen Laboratorium KIHT Kudus
34. Koordinasi intensif Tim Pelaksana dengan instansi terkait (KPPBC Kdus, DPMPTSP, Disperindag Prov, PI)

35. Penyesuaian jadwal pekerjaan fisik dengan aktivitas kantor
36. Pengusulan penambahan SDM yang kompeten untuk percepatan penyelesaian pekerjaan

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7.*

1. Menyusun Rancangan Informasi & Komunikasi atas RTP Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

   Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8.*

2. Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko, & RTP Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanismepemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e).*

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak- pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Membuat perencanaan baru yang dipersiapkandengan matang agar tidak mengalami kegagalan lagidalam penyusunan dokumen
2. Mengumpulkan data secara komprehensif
3. Peningkatan Kompetensi penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui diklat/bimtek"
4. Koordinasi dengan Bidang Perbendaharaan dan KPP Kudus
5. Peningkatan Kompetensi pengelola keuangan melalui diklat/bimtek"
6. Koordinasi dan konsultasi terkait kebutuhan instalasi listrik
7. Konsultasi dan Koordinasi dengan bappeda untuk tindak lanjut priortias kebutuhan
8. Pengusulan Pergeseran anggaran Perangkat Daerah
9. Konsultasi dan Koordinasi dengan bappeda untuk tindak lanjut priortias kebutuhan
10. Memberikan sosialisasi tahapan pembuatan AK1 melalui media sosial.
11. Koordinasi dengan Dunia usaha/Penyedia kerja
12. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja sesuai Permenaker No. 39 Tahun 2016
13. Memberikan Soisalisasi Persyaratan sebagai CPMI Sesuai PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
14. Koordinasi dengan Tingkat Provinsi terkait quota transmigran
15. Menyampaikan informasi program transmigrasi kepada calon transmigran

16. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja sesuai Permenaker No. 39 Tahun 2016"
17. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan sarana hubungan industrial
18. Memberikan sosialisasi dan publikasi jenis pelatihan perkoperasian
19. Update Jenis Pelatihan yang dibutuhkan koperasi
20. Update review SOP/ aturan
21. Memberikan sosialisasi dan publikasi jenis sosialisasi dan hibah uang
22. Update Jenis sosialisasi dan hibah uang yang dibutuhkan UMKM
23. Koordinasi secara Intensif dengan BPPKAD
24. Koordinasi Internal pada Dinas
25. Koordinasi secara Intensif dengan Kelompok Wira Usaha
26. Koordinasi secara Intensif dengan BPPKAD
27. Koordinasi Intensif dengan Bagian Layanan Pengadaan Bar/Jas selama proses lelang
28. Penyesuaian jadwal pekerjaan fisik dengan aktivitas kantor
29. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara intensif
30. Pengawasan terhadap jaminan pemeliharaan hasil pekerjaan
31. Penyesuaian jadwal pekerjaan fisik dengan aktivitas kantor
32. Peningkatan kompetensi SDM Laboratorium KIHT
33. Pelaksanaan Audit Internal dan Kajian Manajemen Laboratorium KIHT Kudus
34. Koordinasi intensif Tim Pelaksana dengan instansi terkait (KPPBC Kudus, DPMPTSP, Disperindag Prov, PI)
35. Penyesuaian jadwal pekerjaan fisik dengan aktivitas kantor
36. Pengusulan penambahan SDM yang kompeten untuk percepatan penyelesaian pekerjaan

Informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, Form 8.

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

   Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan pada Triwulan 4 Tahun 2023, *Form 9.*

2. Pemantauan kejadian risiko

   Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10.*

BAB VI
PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat operasional Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS NAKERPERINKOPTI UKM

Dra. RINI KARTIKA HADI AHMAWATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19690120 199403 2 003